

Analisis Alumni Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV Pola Baru (On-Off) dalam Perspektif Inovasi Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat

Izzah Seanto¹, Neni Alyani^{2*}

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nenialyani5@gmail.com

(Diterima 5 Maret 2026, Disetujui 14 Maret 2026, Tersedia Online 30 April 2026)

Abstract: This study aims to analyze the implementation of innovation by alumni of the Level IV Leadership Education and Training Program (Diklatpim IV) New Pattern (On-Off) from the perspective of public sector innovation within the Social Affairs Office of Lahat Regency. The background of this research is based on the importance of developing civil servant competencies as a strategic instrument for bureaucratic reform and sustainable improvement of public service quality. This study employed a descriptive qualitative approach, utilizing primary data obtained through in-depth interviews with alumni and secondary data derived from policy documents and institutional reports. Data were analyzed through reduction, narrative presentation, and SWOT analysis prioritized using the ASTRID method to determine strategic issues. The findings indicate that the total of 46,109 PMKS/PPKS requires systematic and data-driven interventions. Optimizing the role of social welfare personnel was identified as the main priority due to its high leverage effect on service improvement. It is concluded that the Diklatpim IV New Pattern effectively promotes the transformation of civil servant capacity and generates contextual, adaptive, and sustainable public service innovations at the regional level.

Keywords: Civil Servants; Diklatpim IV; Operational Leadership; Public Service Innovation; Social Welfare.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Pola Baru (On-Off) dalam perspektif inovasi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengembangan kompetensi ASN sebagai instrumen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara mendalam kepada alumni serta data sekunder dari dokumen kebijakan dan laporan kelembagaan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian naratif, serta analisis SWOT yang diprioritaskan menggunakan metode ASTRID untuk menentukan isu strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah PMKS/PPKS sebanyak 46.109 jiwa menuntut intervensi sistematis dan berbasis data. Optimalisasi peran tenaga kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai prioritas karena memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Disimpulkan bahwa Diklatpim IV Pola Baru efektif mendorong transformasi kapasitas ASN dan menghasilkan inovasi pelayanan publik yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Diklatpim IV; Inovasi Pelayanan Publik; Kepemimpinan Operasional; Kesejahteraan Sosial.

1. Pendahuluan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen strategis dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) dirancang untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional yang berorientasi pada perubahan serta mendorong lahirnya inovasi di unit kerja masing-masing [1]. Secara normatif, pengembangan kompetensi ASN telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagai dasar profesionalisme aparatur [2]. Dengan demikian, Diklatpim IV tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen transformasi organisasi melalui proyek perubahan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklatpim IV secara umum telah berjalan sesuai tahapan kurikulum dan mampu meningkatkan pemahaman konseptual serta kapasitas kepemimpinan peserta [3–5].

Evaluasi program menegaskan bahwa aspek input, proses, dan output pelatihan telah terlaksana secara sistematis, serta memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja peserta. Selain itu, diklat juga dinilai efektif dalam membekali peserta dengan kemampuan merancang proyek perubahan sebagai bagian dari implementasi kompetensi kepemimpinan operasional.

Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada evaluasi penyelenggaraan program dan efektivitas proses pembelajaran, sementara analisis terhadap implementasi nyata inovasi alumni dalam konteks organisasi spesifik belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung menekankan keberhasilan prosedural dan capaian kompetensi individu, tetapi belum secara mendalam mengkaji keberlanjutan proyek perubahan setelah peserta kembali ke unit kerja. Selain itu, integrasi analisis faktor internal dan eksternal organisasi dalam mendukung atau menghambat inovasi pascadiklat juga masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas fokus penelitian ke arah evaluasi dampak dan keberlanjutan inovasi dalam lingkungan organisasi publik.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menempatkan alumni Diklatpim IV sebagai agen perubahan dalam perspektif inovasi organisasi. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan pelatihan dari aspek penyelenggaraan, tetapi juga mengkaji bagaimana kompetensi yang diperoleh selama diklat diimplementasikan dalam bentuk inovasi nyata serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan pendekatan yang berorientasi pada outcome dan keberlanjutan perubahan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan model evaluasi Diklatpim IV yang lebih komprehensif dan berbasis dampak organisasi.

2. Metode dan Eksperimen

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis perspektif inovasi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Pendekatan kualitatif menekankan pembentukan narasi berdasarkan pengalaman, persepsi, dan perilaku informan dalam konteks alamiah [6], sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena sosial yang terjadi tanpa manipulasi variabel penelitian [7]. Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu mengungkap realitas empiris secara mendalam dan kontekstual.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari alumni Diklatpim Tingkat IV yang dipilih berdasarkan relevansi pengalaman dan keterlibatan mereka dalam implementasi inovasi di unit kerja masing-masing, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan pelatihan, serta arsip kelembagaan yang mendukung analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur, observasi langsung terhadap kondisi organisasi, serta dokumentasi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif. Untuk memperdalam identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi inovasi ASN, digunakan analisis SWOT yang kemudian diprioritaskan melalui uji litmus guna menentukan isu strategis. Prosedur ini dirancang untuk menjamin transparansi metodologis sehingga penelitian dapat dipahami dan direplikasi dalam konteks yang serupa.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pola Baru (*On-Off*) pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang sekaligus mengimplementasikan inovasi pelayanan publik. Inovasi yang dikembangkan tidak bersifat normatif semata, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam diklat tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam praktik nyata yang kontekstual. Tahapan inovasi tersebut diawali dengan proses identifikasi masalah yang dilakukan secara sistematis dan berbasis data kesejahteraan sosial daerah. Pendekatan berbasis data ini menjadi fondasi penting dalam menentukan arah intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Berdasarkan rekapitulasi PMKS/PPKS Kabupaten Lahat

hingga tahun 2021, tercatat sebanyak 46.109 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan. Angka tersebut merepresentasikan beban sosial yang cukup besar dan menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di daerah tersebut bersifat kompleks serta multidimensional. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya strategi penanganan yang terstruktur, terintegrasi, dan inovatif agar pelayanan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebaran data PMKS/PPKS tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi PMKS/PPKS Kabupaten Lahat s.d Tahun 2021

NO	JENIS PMKS/PPKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	42
2	Anak Terlantar	125
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4
4	Anak Jalanan	2
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	104
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah	0
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	5
8	Lanjut Usia Terlantar	4.085
9	Penyandang Disabilitas	733
10	Tunasusila	8
11	Gelandangan	3
12	Pengemis	8
13	Pemulung	49
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWPLP)	32
16	Orang Dengan HIV/AIDS	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	12
18	Korban Trafficking	0
19	Korban tindak kekerasan.	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	47
21	Korban Bencana Alam	559
22	Korban Bencana Sosial	7
23	Perempuan Bermasalah Sosial Ekonomi	977
24	Fakir Miskin	39.304
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
	Jumlah	46.109

Sumber Data : Rekapitulasi PMK/PPKS Dinas Sosial.Kabupaten Lahat.

Besarnya proporsi masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan lanjut usia terlantar menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem pelayanan sosial di Kabupaten Lahat masih tergolong tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap intervensi kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat insidental, melainkan struktural dan berkelanjutan. Tingginya jumlah kelompok rentan tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya tuntutan pelayanan, baik dalam bentuk bantuan sosial, pendampingan, maupun program pemberdayaan yang berkesinambungan. Secara normatif, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang komprehensif dan cukup kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial [8] memberikan kerangka umum mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin [9] secara khusus mengatur strategi dan mekanisme intervensi terhadap kelompok masyarakat miskin. Ketentuan tersebut diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [10] yang mengatur aspek teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pada level daerah, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2014 [11] yang menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan

sosial di wilayah setempat. Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia secara memadai, efektivitas implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum. Keberhasilan pelaksanaan program kesejahteraan sosial juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur pelaksana, kualitas koordinasi antarunit kerja, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan sistem pelayanan untuk beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, regulasi yang kuat perlu diimbangi dengan kompetensi dan inovasi aparatur agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Melalui penerapan analisis ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan Dapat Diintervensi), dilakukan proses penilaian secara sistematis terhadap berbagai isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa permasalahan yang dipilih sebagai fokus intervensi benar-benar memiliki urgensi tinggi, berdampak signifikan, serta memungkinkan untuk dilakukan tindakan perbaikan secara realistis dalam kerangka aksi perubahan. Setiap isu dianalisis berdasarkan tingkat aktualitasnya di lapangan, kejelasan ruang lingkup permasalahannya, potensi transformasi yang dapat dihasilkan, relevansinya dengan tugas dan fungsi organisasi, nilai kebaruan atau inovasi yang mungkin dikembangkan, serta peluang untuk diintervensi melalui kebijakan dan tindakan administratif. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperoleh temuan bahwa isu kurang optimalnya peran tenaga kesejahteraan sosial yang meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan relawan sosial lainnya menempati posisi dengan skor tertinggi dibandingkan isu-isu strategis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas dan efektivitas aktor pelaksana di tingkat lapangan dipandang sebagai titik krusial yang perlu segera mendapatkan perhatian. Dengan demikian, optimalisasi tenaga kesejahteraan sosial ditetapkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan aksi perubahan. Adapun hasil lengkap dari analisis ASTRID tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Analisis ASTRID terhadap Isu Strategis

No	Isu Strategis / Masalah	Kriteria Isu Strategis untuk Aksi perubahan (ASTRID)					Σ Jumlah (100%)	Peringkat	
		Aktual (15)	Spesifik (15)	Transformasi (20)	Relevan (15)	Inovatif (20)			Dapat Diintervensi (15)
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Sosial berjumlah 46.109	15	15	15	15	18	12	92	2
2	Kurang maksimalnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam penyelenggaraan dan pembinaan/penyuluhan pada masyarakat PMKS/PPKS	15	15	18	15	20	15	98	1
3	Regulasi pendukung pelayanan dan penyuluhan sosial masyarakat (PENSOSMAS) dimasa pandemi belum menggunakan media elektronik	15	15	15	15	20	10	90	3

Berdasarkan hasil analisis ASTRID terhadap tiga isu strategis yang diidentifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat, terlihat adanya proses penentuan prioritas yang dilakukan secara sistematis dan rasional. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan besarnya permasalahan, tetapi juga tingkat urgensi, relevansi kelembagaan, potensi transformasi, serta peluang intervensi yang dapat dilakukan secara realistis dalam kerangka aksi perubahan.

Isu pertama berkaitan dengan tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mencapai 46.109 jiwa. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa beban sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Lahat tergolong signifikan dan bersifat multidimensional. Permasalahan ini mencerminkan kondisi aktual yang nyata di masyarakat dan memiliki keterkaitan langsung dengan mandat institusi. Namun demikian, penanganan terhadap tingginya jumlah PMKS tidak dapat dilakukan secara instan

karena membutuhkan pendekatan yang komprehensif, lintas sektor, dan berjangka panjang. Dengan kata lain, isu ini lebih merepresentasikan dampak akhir dari berbagai faktor struktural yang kompleks, sehingga intervensinya memerlukan strategi yang lebih luas dan terintegrasi.

Isu kedua berfokus pada kurang optimalnya peran tenaga kesejahteraan sosial, yang meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat PMKS/PPKS. Isu ini dinilai strategis karena menyentuh langsung aspek kapasitas dan efektivitas pelaksana kebijakan di tingkat lapangan. Apabila kapasitas dan koordinasi tenaga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan, maka dampaknya akan dirasakan secara langsung pada kualitas pelayanan dan pendampingan masyarakat. Dengan demikian, penguatan aktor pelaksana dipandang memiliki daya ungkit yang besar terhadap perbaikan sistem secara keseluruhan. Isu ini juga relatif lebih memungkinkan untuk diintervensi melalui langkah-langkah manajerial, penguatan koordinasi, dan inovasi pelayanan.

Adapun isu ketiga berkaitan dengan regulasi pendukung pelayanan dan penyuluhan sosial masyarakat (PENSOSMAS), khususnya dalam konteks adaptasi terhadap kondisi pandemi yang belum sepenuhnya memanfaatkan media elektronik. Isu ini menunjukkan adanya kebutuhan transformasi digital dalam pelayanan sosial agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Meskipun memiliki nilai inovatif dan relevansi yang tinggi, implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi aparatur, serta dukungan kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, isu ini diposisikan sebagai prioritas lanjutan setelah penguatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penentuan prioritas isu tidak hanya didasarkan pada besarnya masalah, tetapi juga pada pertimbangan efektivitas intervensi dan potensi transformasi yang dapat dihasilkan. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan analitis alumni Diklatpim IV dalam melihat hubungan antara akar permasalahan dan strategi perubahan yang paling berdampak. Dengan memusatkan perhatian pada optimalisasi tenaga kesejahteraan sosial sebagai titik intervensi utama, diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat memberikan efek sistemik terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim IV) Pola Baru (*On-Off*) efektif dalam mendorong alumni menjadi agen perubahan yang mampu mengimplementasikan inovasi nyata di lingkungan organisasi. Pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat, inovasi yang dirancang alumni didasarkan pada identifikasi masalah berbasis data, khususnya tingginya jumlah PMKS/PPKS sebanyak 46.109 jiwa. Meskipun regulasi nasional dan daerah telah tersedia secara komprehensif, efektivitas pelayanan sosial sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dan kualitas tata kelola organisasi.

Melalui analisis ASTRID, kurang optimalnya peran tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, PSM, dan TAGANA) ditetapkan sebagai isu strategis utama karena memiliki daya ungkit tinggi terhadap perbaikan sistem pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola baru Diklatpim IV tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga menghasilkan perubahan organisasi yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola kesejahteraan sosial di daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan*, Jakarta, 2015.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, 2014.

- [3] R. Ramadhany, *Evaluasi Penyelenggaraan Diklat PIM Tk. IV Pola Baru Pada Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN Makassar*, Skripsi, 2018.
- [4] A. M. I. Rusali Masdar, *Evaluasi Program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Organisasi Perangkat Daerah dalam Mengembangkan Inovasi Pelayanan Publik*, Skripsi, 2019.
- [5] Nursaifullah dan Z. Arifin, “Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) IV Pada BKPSDMA Kabupaten Sinjai,” *Jurnal*, 2019.
- [6] N. Mantra dalam Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- [7] I. S. Wekke dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2009.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, Jakarta, 2011.
- [10] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2012.
- [11] Pemerintah Kabupaten Lahat, *Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lahat*, Lahat, 2014.
- [12] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2012.